



Hal 55 (Aslam Noor)

terakhir di foto  
ISSN

TRANSAKSI POLITIK DI ERA OTONOMI DAERAH

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)  
ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

PENYELESAIAN PERKARA PENGADILAN DALAM  
RUMAH TANGGA

PEMBAGIAN WARISAN DI RUMAH TANGGA  
MOKROKONDOWATI KOTAKSI SURAWI SUTANA

GAGASAN BARU

KEYAKINAN RETILASAN DAN TRANSISI BERAGAMA

EKSISTENSI PANITIA PENYELISIHAN PERSELISIHAN PERBURUHAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1964

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DESA DALAM PENGELOLAAN HUTAN  
BERSAMA MASYARAKAT DI KABUPATEN BANDUNG MELALUI PENDEKATAN  
HUKUM BERPERSPEKTIF PEREMPUAN/FEMINIST JURISPRUDENCE



## GAGASAN PELAKSANAAN LANDREFORM SISTEM GAYA BARU (Suatu Telaah Kontemplatif Antara Peluang & Tantangan)

Oleh :

Aslan Noor<sup>1</sup>

---

### Abstract

*The Republic of Indonesia problem of pre and post independence is poorness of endless nation. One of main cause is power problem, property, exploiting and soil, land, ground usage. Indonesia fails exit from agricultural country towards industrial state, agricultural sector finally is leaved. As a result, poor farmer increasingly increases along industrial sector failure, which many utilizing agricultural land.*

*President Republic of Indonesia (RI) in oration of initial politics of year, date of January 31, 2007 expressing, that "land for justice and people prosperity". As its implementation, President RI has targeted Agraria Reform National Program (ARNP). This program, not other is program landreform plus access reform, which its core (in tight understanding) can be categorized allots ARNP object land to poor farmer.*

*Problem emerges, according to Section 1 Government Regulation (PP) No. 224 of 1961 jo. Kep. Ka. BPN No. 25 of 2002 beforehand land must which has been affirmed to become object land Landreform, because of side by limited object land potency, also in its affirmative is also full of juridical risk, like collision to forestry asset, transmigration, custom public customary right for land and others.*

Kata kunci : administrasi, distribusi, landreform, petani, peraturan, tahap, kesejahteraan.

---

### A. PENDAHULUAN

#### Landreform Misi Utama UUPA

Problema NKRI terbesar pra dan pasca kemerdekaan adalah kemiskinan bangsa yang berkepanjangan. Salah satu pemicu utamanya adalah problema ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah (P4T). Indonesia gagal keluar dari negara agraris menuju negara industri, sektor pertanian akhirnya ditinggalkan. Akibatnya, petani miskin semakin meningkat seiring kegagalan sektor industri, yang banyak menggunakan lahan pertanian.

Krisis tahun 1998, yang ditandai dengan lengsernya kekuasaan fenomenal dan kharismatik (rejim orde baru), maka hampir semua sektor ekonomi yang berkaitan dengan moneter pun dapat dikatakan lumpuh (*economic crisis*).

Data kemiskinan terakhir menunjukkan, bahwa jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 39.05 juta jiwa atau 17,75% dari total populasi Indonesia. Angka kemiskinan tersebut terdapat di perkotaan sebesar 13,36%, sedang di pedesaan mencapai 21,90%. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan paling banyak diderita oleh penduduk pedesaan

---

<sup>1</sup>. Dosen Fakultas Hukum UNPAS.